

Analisis Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Penanggal Dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010

Ninik Aisah¹, Ratna Wijayanti Daniar Paramita², Deni Julianasari³

STIE Widya Gama Lumajang
Email: aisahninik11@gmail.com¹

INFO ARTIKEL

Volume 3
Nomor 4
Bulan Juni
Tahun 2021
Halaman 225-229

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk menilai kesesuaian pengujian laporan keuangan Puskesmas Penanggal dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan analisis penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Penanggal dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi selama periode tertentu yang merupakan hasil pengumpulan data keuangan yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para pemakai di dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan daerah sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Penelitian yang di gunakan dalam menganalisis penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Penanggal dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang harus ada dalam penyajian laporan keuangan yaitu :Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sedangkan pada laporan keuangan Puskesmas Penanggal tidak adanya Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan pada Puskesmas Penanggal telah disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan pada Puskesmas Penanggal meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Kata Kunci : Analisis, Laporan Keuangan, Akuntansi.

ABSTRACT

The purpose of this study was to assess the suitability of testing the financial statements of the Penanggal Health Center with Government Regulation no. 71 of 2010. The type of research used in analyzing the presentation of the Financial Statements of the Penanggal Health Center in the application of PP No. 71 of 2010 is descriptive quantitative research. Financial statements are basically the end result of the accounting process for a certain period which is the result of collecting financial data that can be used as a tool for users in assessing the financial performance of local governments so that they can make the right decisions. The research used in analyzing the presentation of the Financial Statements of the Penanggal Health Center in the application of PP No. 71 of 2010 is descriptive quantitative research. Based on Government Regulation Number 71 of 2010 that must exist in the presentation of financial statements, namely: Budget Realization Report (LRA), Balance Sheet, Operational Report (LO), Report on Changes in Equity (LPE), Report on Changes in Budget Over Balance (SAL) and Notes on Financial Statements (CaLK)) while in the financial statements of the Penanggal Health Center there is no Notes on Financial Statements (CaLK).

Notes on the Financial Statements at the Penanggal Health Center have been presented systematically. Notes on the Financial Statements at the Penanggal Health Center include an explanation or detailed list or analysis of the value of an item presented in the Budget Realization Report, Balance Sheet, and Cash Flow Statement.

Keywords: *Analysis, Financial Statements, Accounting*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi selama periode tertentu yang merupakan hasil pengumpulan data keuangan yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para pemakai di dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan daerah sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Begitu eratnya hubungan antara keterkaitan keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan bermacam - macam kendala sehingga sepenuhnya mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan (Simajuntak, 2010).

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual menghasilkan perubahan yang cukup besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan dapat memperbaiki kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang lebih akurat dalam menilai kinerja pemerintah. Pada tahun 2010, pemerintah mencanangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggung jawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang begitu sangat terlihat dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah mewajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang awalnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual).

Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa penerapan SAP Berbasis Akrual dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dimana dari penerapan sistem SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan sistem SAP Berbasis Akrual. Selanjutnya penerapan lebih lanjut mengenai SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan. Dimana ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara berkala pada pemerintah daerah dapat diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Laporan keuangan disusun agar dapat memberikan informasi yang sesuai mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama diperlukan untuk mengetahui suatu nilai pada sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu dalam penentuan ketaatannya terhadap peraturan perundang - undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan).

Dalam pelaporan keuangan, sudah merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang memperlihatkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi terkini adalah keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Laporan keuangan adalah suatu laporan yang memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2011). Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip dalam akuntansi yang digunakan untuk menentukan periode pengakuan dan pengukuran suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Secara umum terdapat 2 basis akuntansi yaitu basis kas dan basis akrual, namun dalam prakteknya berkembang basis pencatatan yang merupakan modifikasi antara basis kas dan basis akrual yaitu basis kas menuju akrual (cash toward accrual) (Peraturan Pemerintahan Republic Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 : 17-18).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Basis Akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain pada pendapatan diakui atau dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk, sedangkan pada belanja diakui atau dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau tidak selalu pada saat kas keluar. Sehingga dilakukan kesesuaian pengujian laporan keuangan Puskesmas Penanggal dengan PP No. 71 tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam menganalisis penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Penanggal dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian

yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Hal ini bermakna penelitian kualitatif mempelajari sesuatu pada sudut pandang alamiah, menerjemahkannya dan melihat fenomena dalam hal makna yang dipahami manusia. Penelitian kualitatif memiliki diversitas karena ia relevan pada disiplin dan profesi yang berbeda-beda. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma penelitian interpretative yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan gejala interaktif (reciprocal). Jika sebuah metode objektif dalam penelitian kualitatif bertujuan membuat standarisasi observasi maka paradigma metode penelitian interpretative berupaya menciptakan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah Penanggal dalam bentuk kegiatan pokok. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas merupakan pelayanan yang menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk dengan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak dari pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia.

Jumlah pegawai yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Puskesmas Penanggal sebanyak 8 orang. Berdasarkan tingkat pendidikannya yang terdapat pada badan pengelolaan keuangan tersebut terdiri dari: 2 orang dengan tingkat pendidikan SMA, 3 orang dengan pendidikan D3, dan 3 orang dengan tingkat pendidikan S-1. Dari pegawai yang ada tidak lebih dari 75 persen pegawai tersebut yang mengerti dengan Sistem Akuntansi Pemerintah, hal ini disebabkan karena dalam mensosialisasikan sistem dan peraturan-peraturan baru menemui hambatan-hambatan dan membutuhkan waktu yang lama. Salah satu penyebabnya adalah setiap pegawai yang telah mengikuti pelatihan tidak menjamin bahwa mereka telah paham dalam mengoperasikan Sistem Akuntansi Pemerintah dan mampu membaca laporan keuangan. Disamping itu faktor individu atau keinginan untuk menguasai yang dikembangkannya sehingga mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sendiri masih kurang.

Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah dan No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban,

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Puskesmas Penanggal menyajikan Laporan Keuangan Daerah tahun yang berakhir per 31 Desember 2019 sebagai unsur dari Laporan Pertanggungjawaban Puskesmas Penanggal. Mengingat sistem yang diterapkan selama ini belum dapat menjembatani penyusunan Laporan Keuangan, maka dilakukan pendekatan praktis yaitu mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasi serta data lainnya kedalam pos-pos neraca.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Realisasi anggaran tahun 2019 ini disusun berdasarkan jumlah realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan masing-masing anggarannya sesuai dengan APBD Puskesmas Penanggal 2019. Jumlah angka yang tercantum pada laporan realisasi anggaran ini mencakup semua penerimaan, pendapatan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang masuk kedalam atau dikeluarkan dari bendahara umum Puskesmas, khusus untuk pengeluaran pengisian kas yang diberikan kepada pemegang kas, realisasinya didasarkan atas pengesahan pertanggungjawaban. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit.

Pada laporan Realisasi Anggaran Puskesmas Penanggal menyajikan rekening pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasinya. Walaupun dalam prakteknya sering kali realisasinya jauh lebih besar atau lebih kecil dari yang dianggarkan oleh Puskesmas Penanggal. Dari pengolahan data dapat dilihat bahwa pendapatan Puskesmas Penanggal diperoleh dari 3 (tiga) pos, yaitu retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp.246.089.200,- dan retribusi jasa usaha sebesar Rp.72.000,- serta lain – lain pendapatan yang sah yang diperoleh dari pendapatan dana kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan sebesar Rp.834.984.250,-. Pendapatan Puskesmas dari retribusi daerah didapatkan anggaran sebesar Rp 246.089.200. Serta dari retribusi pelayanan kesehatan diperoleh anggaran sebesar Rp. 246.089.200 yang terdiri dari 6 (enam) jenis pendapatan masing-masing Rawat Jalan PKD sebesar Rp. 7.425.000, Rawat jalan Non PKD dan Inovasi sebesar Rp. 27.535.000, Rawat Inap sebesar Rp. 115.920.000, adanya

Pemakaian Mobil Pusling Rp. 11.450.000, Lab. Sederhana sebesar Rp. 1.102.000 dan Pelayanan Kesehatan non kapitasi sebesar Rp. 82.657.200. Penggunaan tertinggi anggaran pada kelompok retribusi pelayanan kesehatan pada rawat jalan PKD yaitu sebesar 142.79% dimana awalnya dianggarkan Rp. 5.200.000 tetapi realisasinya melebihi anggaran awal yaitu sebesar Rp. 7.425.000. Neraca merupakan salah satu dari laporan keuangan daerah. Neraca menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang, dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Puskesmas Penanggal telah menyusun neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasinya ke dalam pos-pos neraca.

Pada tahun anggaran per 31 Desember 2018 pos aset, jumlah aset lancar sebesar Rp.209.253.407,74, jumlah aset tetap sebesar Rp. 6.010.289.179,71, dan jumlah aset lainnya sebesar Rp. 239.669.118,62. Maka total aset pemerintahan kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 6.459.211.706,07. Pada pos kewajiban, jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 117.811.113,00, jumlah ekuitas dana lancar Rp. 6.341.400.893,07, jumlah ekuitas dana jangka panjang Rp. 6.341.400.593,07. Maka total kewajiban dan dana ekuitas pemerintahan kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 6.459.211.706,07.

Pada tahun anggaran per 31 Desember 2019 pos aset, jumlah aset lancar sebesar Rp. 149.611.152,63, jumlah aset tetap sebesar Rp. 6.141.625.822,30, dan jumlah aset lainnya sebesar Rp. 127.252.858,48. Maka total aset pemerintahan kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 6.418.489.823,48. Pada pos kewajiban, jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 136.616.445,00, jumlah ekuitas dana lancar Rp. 5.271.832.350,79, jumlah ekuitas dana jangka panjang Rp. 6.281.870.378,48. Maka total kewajiban dan dana ekuitas pemerintahan kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 6.418.486.823,48.

Sebagaimana seperti teori-teori yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya Puskesmas Penanggal pada tahun 2019 juga menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan Puskesmas Penanggal pada tahun anggaran 2019 telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi-informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Catatan atas Laporan Keuangan pada Puskesmas Penanggal telah disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan pada Puskesmas Penanggal meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Puskesmas Penanggal telah menyajikan catatan atas laporan keuangan yang berisi dasar penyusunan laporan keuangan daerah dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya, pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta basis kas untuk pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas dana (neraca).

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang harus ada dalam penyajian laporan keuangan yaitu :Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sedangkan pada laporan keuangan Puskesmas Penanggal tidak adanya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
2. Untuk menyesuaikan perubahan penyajian Laporan Keuangan ke Standar Akuntansi untuk Pemerintahan yang menggunakan PP 71 tahun 2010, Puskesmas Penanggal perlu melakukan konversi Laporan Keuangan.
3. Kendala dalam menerapkan PP No.71 Tahun 2010, tentang SAP pada Puskesmas Penanggal antara lain, jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD, kesiapan perangkat pendukung (*tools*) yang belum teruji untuk penerapan SAP Berbasis Akrual, masih kurangnya BinteK atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukup

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, B.(2002). Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta.
- Ayu, F., & Steven, T. (2014). Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamabagu. *Junal EMBA*. Vol.2 No.4 Desember 2014, 714-722, ISSN 2303-1174.
- Arriansyah. (2012) . Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (studi pada unit kerja KPPN Malang). Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.

- Binsar, H. &Simanjun. (2008). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintah Di Indonesia.
- Erlina & Sri, M. (2007). Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. USU Press, Medan.
- Erlina, (2008). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. USU Press, Medan.
- Desriandi, D. N. (2016). Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Sebelum dan Sesudah Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar. Batusangkar.
- Semuel, F. (2019). Analisa Laporan Keuangan Sektor Publik. Yoyakarta: Budi Utama.
- Hartina, S. (2009). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara
- Kusuma, R. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember). Universitas Jember.
- Mu'am, A. (2011). Basis AkrualL dalam Akuntansi Pemerintah Indonesia : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Tangerang Selatan: Mifas Rasam Publising.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
- Widyastuti, S. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Karual Di Kabupaten Gianyar. E-Journal, 3(1), 1–12.